

KOMUNIKASI DAKWAH PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN DESA RELIGIUS DI JEPARA

Miftahul Huda

Universitas Selamat Sri Kendal

Email : miftahulhudadt91@gmail.com

Abstract

The village of Margomulyo Jepara has wide and varied da'wah challenges in line with the dynamics of globalization and the development of information technology whose negative effects cause various kinds of socio religious problems. Under these conditions, the village government carried out da'wah communication in order to overcome these problems and build a religious village.

This research is a qualitative research methods as well as policy research. Data collection techniques in this study were through interviews, observation, and documentation. The data analysis techniques used inductive and descriptive narrative forms.

The result of this research is that the da'wah communication carry out the Margoyoso village government is carried out through several stages such as problem formulation, policy formulation, legitimacy, communication and socialization. The background for the birth of this policy was due to the socio-religious problems and political agenda of the village government. The da'wah messages in this study consist of morning prayers in congregation, turning off the television after maghrib, let's recite the recitation and compulsory Early Madrasah which is formulated based on the results of deliberations with the village government, religious leader, community leaders, and religious social organizations. The communication process is carried out with two approaches, namely cultural and structural approaches.

Key words: communication, da'wah, village government, religious village.

Abstrak

Desa Margoyoso Jepara memiliki tantangan dakwah yang luas dan beragam seiring dengan dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang efek negatifnya menyebabkan terjadinya berbagai macam problematika sosial keagamaan. Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Desa melakukan komunikasi dakwah dalam rangka mengatasi problematika tersebut dan membangun desa yang religius.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan sekaligus penelitian kebijakan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya menggunakan bentuk induktif dan deskriptif naratif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa komunikasi dakwah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Margoyoso dilakukan melalui beberapa tahapan seperti formulasi masalah, perumusan kebijakan, legitimasi, komunikasi dan sosialisasi. Latar belakang lahirnya kebijakan tersebut dikarenakan adanya problematika sosial keagamaan dan agenda politik Pemerintah Desa.

Pesan dakwah dalam penelitian ini terdiri dari shalat subuh berjamaah, mematikan televisi setelah maghrib, ayo mengaji, dan wajib madrasah diniyah yang dirumuskan berdasarkan hasil musyawarah bersama Pemerintah Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial keagamaan. Proses Komunikasi dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kultural dan structural.

Kata Kunci : Komunikasi, Dakwah, Pemerintah Desa, Desa Religius.

A. Pendahuluan

Berdakwah merupakan tugas mulia sebagaimana yang telah diteladankan oleh Rasulullah. Dalam sejarahnya, Rasulullah melaksanakan dakwah pertama kali dengan pendekatan individu atau *personal aproach* sebagaimana ketika beliau mengajak keluarga dan saudara terdekatnya untuk berislam. Kemudian dakwah diimplementasikan oleh Rasulullah dengan pendekatan secara terbuka atau terang-terangan kepada masyarakat (Khatib, 2007).

Dakwah di Indonesia pada umumnya dilaksanakan menggunakan pendekatan kultural. Hal tersebut tentunya tidak dapat terlepas dari sejarah masuk dan menyebarnya ajaran agama Islam yang dapat diterima dengan baik melalui berbagai macam konsep seperti majlis ta'lim, akulturasi kesenian, kebudayaan, dan lain sebagainya. Namun seiring perkembangan zaman, kegiatan dakwah memiliki tantangan yang luas dan beragam. Hal tersebut disebabkan dari adanya perubahan sosial yang terjadi seperti globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang efek negatifnya menyebabkan terjadinya peningkatan kemaksiatan baik secara kualitas maupun kuantitas, degradasi moral, kenakalan remaja, kriminalitas, pornografi dan pornoaksi, serta berbagai macam tindakan negatif lainnya

Dengan tantangan tersebut, dakwah kultural melalui metode ceramah dan tulisan dipandang belum mampu sepenuhnya menyelesaikan berbagai macam dinamika permasalahan umat, sehingga di beberapa daerah kegiatan dakwah melalui pendekatan kultural diperkuat dengan pendekatan struktural. Dakwah struktural merupakan pendekatan dakwah yang dilakukan secara legal formal melalui struktur atau kelembagaan. Adanya dakwah struktural tidak terlepas juga dari penafsiran legitimasi undang-undang otonomi daerah yang menerangkan bahwa daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban dalam mengatur dan mengelola daerahnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta pemerintah desa memiliki kewenangan dalam pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Dakwah struktural bertujuan menjadikan birokrasi, kekuasaan, dan kekuatan politik sebagai media dakwah (Muhammad Noer, 2007). Dakwah struktural merupakan pendekatan dakwah yang memandang upaya islamisasi dilaksanakan secara legal formal melalui struktur atau kelembagaan. Dakwah struktural juga dapat dimaknai dengan berdasar pada gagasan bahwa negara ikut serta mengatur kehidupan masyarakat Islam berdasarkan hukum Islam dengan memasukkan nilai-nilai Islam pada produk kebijakan pemerintah.

Menurut teori dakwah struktural, negara dianggap sebagai media yang cukup strategis dalam kegiatan dakwah. Dakwah struktural merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan berbagai perangkatnya untuk membangun tatanan masyarakat sesuai dengan ajaran agama (Tata Sukayat, 2015). Strategi dakwah struktural mengambil bentuk dan masuk dalam kekuasaan dengan terlibat dalam proses eksekutif, yudikatif, dan legislatif serta bentuk-bentuk struktur sosial kenegaraan lainnya, sehingga negara dijadikan sebagai media untuk mencapai tujuan dakwah (Abdul Basith, 2013)

Beberapa contoh daerah yang melaksanakan dakwah struktural adalah misalnya di Bulukumba yang menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan dengan menerapkan program larangan menjual minuman keras, pengelolaan zakat, pakaian muslim dan muslimah, serta regulasi tentang kemampuan untuk membaca dan menulis al quran bagi siswa dan calon pengantin (Amril Maryolo, 2017), serta di Kabupaten Bandung yang memiliki program dakwah struktural dengan konsep Bandung Agamis. Program tersebut digagas oleh Ridwan Kamil dalam upaya untuk meningkatkan kualitas spiritual masyarakat Bandung. Program Bandung agamis menelurkan beberapa program kebijakan seperti Gerakan Magrib Mengaji, Gerakan Ayo Bayar Zakat, dan Gerakan Salat Subuh Berjamaah.

Selain itu, Dakwah struktural juga dilaksanakan di Jepara. Jepara merupakan salah satu kota yang memiliki nuansa keagamaan kuat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kuantitas lembaga pendidikan yang sangat banyak, seperti pondok pesantren, dan sekolah agama, baik formal maupun non formal. Bahkan, Pada tahun 2014, Jepara menjadi daerah dengan jumlah pondok pesantren terbanyak se Jawa Tengah. Religiusitas di Jepara juga didukung dengan adanya penghargaan dari pemerintah pusat sebagai daerah yang sangat peduli dengan pendidikan Islam.

Meskipun terdapat banyak lembaga pendidikan, namun di Jepara juga terdapat berbagai macam problematika masyarakat sebagai bagian dari dampak perubahan sosial, globalisasi, dan perkembangan teknologi informasi yang berkaitan dengan degradasi

moral, kriminalitas, dan kenakalan remaja. Sebagai bukti misalnya dibuktikan dengan angka kenakalan remaja yang tergolong tinggi yaitu 190.194 kasus.

Dakwah struktural yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Desa Margoyoso merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Jepara. Berdasarkan letak geografis wilayah, Desa Margoyoso terletak di wilayah Kabupaten Jepara bagian selatan, tepatnya di Kecamatan Kalinyamatan. Desa Margoyoso mempunyai luas keseluruhan wilayah 126.622 Ha. Luas wilayah tersebut terbagi ke dalam beberapa bentuk seperti pemukiman, pertanian, fasilitas umum, kegiatan ekonomi, dan lain sebagainya. Berdasarkan data administrasi pemerintahan, Desa margoyoso memiliki jumlah penduduk 7.032 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki 3.567 dan perempuan 3.465.

Untuk menunjang keberhasilan dakwah, diperlukan adanya proses komunikasi dakwah. Komunikasi dakwah adalah kegiatan yang berfokus pada penyampaian dakwah. Keberhasilan dakwah tergantung dari bentuk penyampaian materi atau pesan yang dilakukan. Dalam proses komunikasi dakwah, diperlukan adanya strategi yang baik dan efektif agar pesan dakwah dapat diterima oleh komunikan. Dalam penelitian ini, fokus kajiannya adalah berkaitan dengan komunikasi dakwah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Margoyoso Kalinyamatan Jepara dalam membangun desa yang religius. Keunikan dalam penelitian ini adalah bagaimana komunikasi dakwah dilaksanakan oleh pemerintah desa yang merupakan lembaga pemerintah di tingkat paling bawah dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat *grass root* yang identik dengan dakwah kultural.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Jepara dengan membatasi lingkup kajiannya di desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Alasan pemilihan desa Margoyoso sebagai objek penelitian adalah karena termasuk desa di kabupaten Jepara yang membuat kebijakan dakwah melalui kebijakan publik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dari mana data yang diperlukan oleh peneliti dapat diperoleh. Menurut Lofland sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, yang lainnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya.

Sedangkan data sekunder merupakan data yang pengumpulannya bukan disuahkan sendiri oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Sedangkan sumber data keduanya adalah dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi standar. Maksudnya peneliti menggunakan wawancara dengan cara membuat garis-garis besar pokok pembicaraan, namun dalam pelaksanaannya mengajukan pertanyaan secara bebas. Selain itu, peneliti juga menggunakan konsep wawancara tidak standar dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis sehingga dapat lebih luas dan terbuka dalam pelaksanaannya. Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Perwakilan Desa, tokoh agama dan masyarakat, para pengajar di lembaga formal dan non formal serta stakeholder lainnya yang memiliki keterkaitan dengan data penelitian ini. Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif, artinya peneliti mengamati secara langsung dengan tujuan agar dapat merasakan dan memaknai peristiwa dan gejala sosial yang terjadi, serta bagaimana proses komunikasi dakwah pemerintah desa Margoyoso dalam membangun desa yang religius. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab dan melengkapi data terkait lingkungan desa yang meliputi kondisi demografis dan geografis, kondisi sosial keagamaan, kondisi masyarakat, visi misi pemerintah desa, dan bukti tertulis tentang mekanisme kebijakan desa serta kebijakan dakwah.

Dalam penelitian ini, teknik analisis datanya menggunakan bentuk induktif, artinya peneliti tidak hanya mencari data atau fakta untuk kepentingan pembuktian atau penolakan terhadap teori dan konsep dari komunikasi dakwah, tetapi peneliti berupaya menemukan fakta-fakta yang banyak dan beragam yang kemudian ditelaah sehingga menjadi kesimpulan yang lebih berarti. Penelitian ini juga menggunakan teknik deskriptif naratif yang menurut Miles dan Huberman dilaksanakan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti merangkum dan memfokuskan pada hal pokok yang berkaitan dengan komunikasi dakwah Pemerintah Desa Margoyoso yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian dan narasi yang berisi tentang jawaban atas rumusan masalah yang telah peneliti tentukan

C. Hasil dan Pembahasan

1. Latar Belakang Munculnya Dakwah

Adanya dakwah struktural melalui kebijakan publik di Margoyoso tidak dapat terlepas dari adanya pergeseran tata nilai dalam masyarakat. Tata nilai merupakan aturan pandangan dan anggapan masyarakat yang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam

menilai sesuatu dan dalam mengendalikan serta memilih tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Tata nilai juga dapat diartikan sebagai kumpulan norma yang diakui oleh masyarakat dan digunakan sebagai pedoman dalam menentukan realitas yang ada di sekelilingnya, dan dalam menentukan sikap selanjutnya.

Menurut Tholhah Hasan, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran tata nilai dalam masyarakat seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan dan pertumbuhan ekonomi, perubahan politik dan peranan kekuasaan pemerintahan, perubahan lingkungan biofisik, dan pengaruh kebudayaan luar (Amrullah, 1985). Faktor-faktor tersebut dapat juga saling berkaitan satu sama lain sehingga memberi kadar pengaruh yang lebih besar, baik pergeseran tata nilai yang bersifat konstruktif maupun yang bersifat destruktif (Muhammad Tholhah Hasan, 2003).

Sebenarnya adanya perubahan tata nilai dalam masyarakat tersebut dapat memberikan dampak positif apabila disertai dengan kearifan diri, mampu membedakan antara yang bermanfaat dan tidak, antara yang mengandung *masalah* dan *mafsadah*. Perubahan tata nilai tersebut juga dapat memberikan dampak negatif jika masyarakat mengalami erosi nilai sehingga hal yang tertanam didalamnya menjadi runtuh dan nilai-nilai baru yang menjadi penggantinya belum siap atau belum jelas peranannya. Kondisi tersebut umumnya dialami oleh masyarakat yang sedang mengalami masa transisi seperti halnya masyarakat desa Margoyoso. Pergeseran tata nilai masyarakat disebabkan oleh berbagai problematika yang timbul menyebabkan pengaruh dalam pola pikir masyarakat. Cara pandang masyarakat terhadap suatu masalah juga dipengaruhi oleh perubahan situasi dan kondisi pada masyarakat serta perkembangan teknologi yang sangat cepat.

Permasalahan sosial seperti adanya degradasi moral, kenakalan remaja, kriminalitas, dan gejolak politik yang ada suatu wilayah akan mempengaruhi atau memaksa aktor kebijakan untuk meresponnya dengan memasukannya ke dalam agenda pemerintah yang selanjutnya melahirkan kebijakan publik untuk memecahkan masalah-masalah yang bersangkutan. Menurut teori sistem, pembuatan atau lahirnya kebijakan publik tidak dapat terlepas dari pengaruh lingkungan. Tuntutan adanya kebijakan publik biasanya lahir karena adanya pengaruh lingkungan, dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu sistem politik.

a. Formulasi Masalah

Formulasi masalah merupakan upaya untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi serta bagaimana masalah tersebut perlu menjadi masalah kebijakan dan masuk dalam agenda pemerintah. Sebuah permasalahan dikategorikan menjadi dua

macam, yaitu masalah privat dan masalah publik. Permasalahan dapat dikatakan sebagai masalah privat apabila masalah tersebut dapat diselesaikan tanpa mempengaruhi orang lain. Begitupun sebaliknya, jika permasalahan tersebut solusinya harus dengan campur tangan atau pengaruh dari orang lain berarti dinamakan masalah publik. Oleh karena itu, permasalahan publik dapat dipahami sebagai akibat belum terpenuhinya nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang diinginkan oleh publik serta cara pemenuhannya membutuhkan kebijakan dari pemerintah.

Dalam penyusunan agenda kebijakan, setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Desa Margoyoso. Pertama, membangun persepsi di kalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah yang serius, sebab boleh jadi suatu gejala atau fenomena di kelompok masyarakat dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elit politik bukan dianggap sebagai masalah. Kedua, membuat batasan dari permasalahan agar dapat terarah secara jelas. Ketiga, menggerakkan dukungan agar permasalahan tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Mobilisasi dukungan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, melalui kekuatan politik, publikasi melalui media, dan lain sebagainya.

Permasalahan yang dapat dikategorikan sebagai masalah publik biasanya identik dengan berbagai macam karakteristik seperti saling ketergantungan antara berbagai macam masalah, subyektifitas dari masalah kebijakan, *artificiality* masalah, dan dinamika masalah kebijakan. Suatu masalah publik bukanlah masalah yang berdiri sendiri, akan tetapi ada saling keterkaitan antara satu masalah dengan masalah lain. Pada aspek saling ketergantungan, permasalahan yang terjadi diklasifikasikan sesuai dengan empat kebijakan yang dicetuskan oleh pemerintah desa. Lahirnya kebijakan dakwah struktural mematikan televisi setelah magrib yang disertai dengan gerakan ayo mengaji dilatarbelakangi karena adanya degradasi moral, dan kenakalan remaja yang terjadi.

Pada aspek subyektifitas dari masalah kebijakan, masalah kebijakan merupakan hasil pemikiran dalam konteks lingkungan tertentu, sehingga fenomena yang dianggap sebagai masalah dalam lingkungan tertentu boleh jadi bukan menjadi masalah di lingkungan lain. Permasalahan yang terjadi di Margoyoso boleh jadi hanya memiliki ketidaksamaan dengan permasalahan yang dihadapi lingkungan lain. Pada aspek *artificiality* masalah, suatu fenomena dianggap sebagai sebuah permasalahan karena

adanya keinginan dari manusia untuk mengubah situasi dan kondisi. Adanya degradasi moral, kenakalan remaja, minimnya anak-anak dalam pendidikan agama, dampak negatif globalisasi dan perkembangan teknologi informasi menjadi keprihatinan dari Pemerintah Desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat sehingga mereka memiliki inisiatif untuk mengatasi problematika tersebut dan mengubah situasi menjadi lebih baik.

Adapun pada aspek dinamika masalah kebijakan, solusi pada sebuah masalah sering berubah. Permasalahan yang sama belum tentu dapat dipecahkan dengan kebijakan yang sama jika konteks lingkungannya berbeda. Demikian juga, masalah yang sama belum tentu dapat dipecahkan dengan kebijakan yang sama jika waktunya berbeda. Dalam tahap formulasi masalah diperlukan adanya informasi dan data yang valid agar arah kebijakan yang dirumuskan dapat terarah dan tepat sasaran. Apabila perumusan masalah tidak didukung dengan informasi dan data yang valid, dan hanya sekedar berdasarkan asumsi saja, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap ketepatan hasil kebijakan. Selama ini Pemerintah Desa menggunakan informasi dan data dari data statistik desa, keluhan dan laporan dari para orang tua serta tokoh masyarakat.

1. Degradasi Moral Remaja Sebagai Masalah Publik

Dalam kehidupan sosial masyarakat, Desa Margoyoso dikenal dengan berbagai karakteristik seperti memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal antara warga masyarakatnya, memiliki ikatan emosional yang kuat, dan memiliki tingkat religiusitas tinggi. Namun seiring perkembangan zaman, karakteristik sebagaimana tersebut mulai luntur sehingga terdapat berbagai macam permasalahan sosial.

Degradasi moral remaja merupakan salah satu permasalahan sosial yang sering terjadi di Margoyoso. Secara umum, degradasi moral remaja di Margoyoso terjadi karena faktor penyimpangan sosial, perkembangan globalisasi yang tidak seimbang, pengaruh budaya asing, kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua, dan rendahnya tingkat pendidikan. Moral remaja dari tahun ketahun mengalami penurunan kualitas atau degradasi dalam berbagai aspek moral seperti tutur kata, cara berpakaian, gaya hidup, dan lain sebagainya.

Faktor ketahanan keluarga menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya degradasi moral remaja di Margoyoso. Sebagai pondasi pertama untuk anak, orang tua sebenarnya memegang peranan penting untuk membentengi anak dari pengaruh negatif yang dapat mengikis moral. Beberapa hal yang dikhawatirkan oleh Pemerintah Desa Margoyoso adalah semakin meluasnya penyimpangan-

penyimpangan moral seperti minum-minuman keras, narkoba, pornografi, dan lain sebagainya.

Menurut Pemerintah Desa Margoyoso, permasalahan publik di lingkungan Margoyoso sangat kompleks sehingga membutuhkan penanganan dari Pemerintah Desa. Berangkat dari permasalahan tersebut, Pemerintah Desa menganggap perlu adanya kebijakan dakwah sebagai salah satu solusi untuk mengatasi problem degradasi moral remaja..

2. Kebijakan Dakwah Sebuah Agenda Pemerintah

Agenda setting merupakan proses mengagendakan isu atau permasalahan publik ke dalam proses kebijakan. Hal ini bertujuan agar isu publik dapat terselesaikan melalui instrumen kebijakan. Isu publik yang telah masuk ke dalam agenda setting akan dipilah melalui skala prioritas dengan berbagai macam isu publik lainnya. Ketika isu publik dianggap penting dengan cakupan dampak yang cukup luas maka isu publik tersebut akan diprioritaskan menjadi sebuah kebijakan (Erwan Agus, 2015).

Pada dasarnya analisis agenda setting dilakukan untuk menetapkan apa yang harus dikerjakan oleh Pemerintah Desa sebagai pembuat kebijakan. Hogwood dan Gunn membagi dua tahapan proses agenda setting, yaitu *issue search* terkait dengan proses dan upaya mencari isu untuk ditetapkan ke dalam agenda. Adapun isu yang lain adalah *issue filtration* yang terkait dengan proses memilah isu (Brian W, 1984)

Apabila dalam masyarakat terdapat perdebatan dan perbedaan pandangan dalam melihat hakikat dari suatu permasalahan, maka masalah tersebut dipandang sebagai sebuah isu. Oleh karena itu, posisi masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam isu perlu diperhitungkan kepentingan, kekuatan, dan kecenderungannya. Masing-masing pihak mempunyai pengaruh terhadap kemampuannya dalam mendukung atau menolak sebuah kebijakan.

Proses masuknya isu dalam tahap agenda setting sampai diformulasikan menjadi kebijakan publik merupakan tahap yang cukup kritis. Pada tahapan menganalisis isu publik untuk dimasukkan dalam agenda setting biasanya terjadi persaingan yang ketat antar kepentingan dan kekuatan dalam masyarakat (Said Zainal, 2015).

Jika kebijakan dakwah Pemerintah Desa Margoyoso pada mulanya suatu isu, maka ditetapkan sebagai suatu agenda kebijakan. Agenda kebijakan dapat disebutkan sebagai daftar permasalahan yang harus ditindak lanjut (Charles O,

1977). Edward menjelaskan bahwa sebagai pertarungan antar kepentingan, hanya beberapa isu saja yang ditindak lanjuti. Isu-isu tersebut masuk dalam agenda kebijakan biasanya dengan cara inisiatif oleh pengambil kebijakan, adanya desakan dari pihak di luar pemerintah, lembaga peneliti milik pemerintah, perorangan di luar organisasi pemerintah, ataupun dari media masa (George C, 1978).

Jika melihat cara isu menjadi sebuah agenda kebijakan dakwah Pemerintah Desa Margoyoso karena ada inisiatif dari pihak pemerintah, yaitu Sudi Hariyanto selaku Kaur. Perencanaan yang kemudian didukung oleh kepala desa, perangkat desa, dan pihak luar pemerintah, baik dari perorangan maupun kelompok keagamaan seperti Nahdlatul Ulama Ranting Margoyoso.

Penerapan kebijakan dakwah tersebut sarat dengan kepentingan politik Pemerintah Desa. Margoyoso yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan berafiliasi pada kelompok keagamaan Nahdlatul Ulama menjadikan Kepala Desa mengkampanyekan penegakan dakwah melalui kebijakan publik. Hal tersebut membuka peluang untuk saling mempengaruhi antara politisi yang ingin mendapatkan dukungan masyarakat dalam pemilihan kepala desa berikutnya.

Meskipun demikian, menurut Miftakhul Huda, Kepala Desa Margoyoso, kebijakan dakwah tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Proses pembuatan kebijakan dakwah telah dirumuskan oleh pemerintah desa bersama dengan Badan Perwakilan Desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama setempat.

b. Formulasi Kebijakan Dakwah

Formulasi kebijakan adalah bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan untuk memecahkan permasalahan tersebut dan siapa saja yang ikut serta dalam formulasi kebijakan. Tahapan formulasi ini membahas permasalahan publik yang akan diselesaikan menggunakan beragam alternatif kebijakan. Dalam pengambilan keputusan terdapat beragam model perumusan kebijakan yang dilakukan aktor untuk menentukan desain kebijakan yang sesuai permasalahan yang dihadapi.

Pembuat kebijakan (*policy making*) dalam pengambilan keputusan setidaknya memilih pilihan yang terbaik di antara sekian model dan teknik pengambilan keputusan tersebut serta mengetahui pilihan model yang terbaik. Model dan teknik pengambilan keputusan tersebut digunakan untuk menganalisa, mencari informasi, terkait berbagai alternatif yang ada untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Purwo Santoso, 2010).

Proses perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan tujuan kebijakan yang sesuai tujuan yang semestinya. Pembuat kebijakan atau *policy making* biasanya memiliki tujuan politik serta tujuan pribadi yang mempengaruhi pilihan dalam menentukan model desain kebijakan mereka. Perumusan kebijakan sering disamakan dengan kebijakan yang ada di tempat lain, sehingga terdapat difusi kebijakan dalam mengadopsi kebijakan yang serupa dari daerah yang dianggap paling inovatif dalam merumuskan kebijakan (Anne Schneider, 2017).

Pemerintah Desa Margoyoso menggunakan strategi audiensi sebagai langkah awal perumusan kebijakan keagamaan. Pemerintah Desa mengundang para tokoh agama, tokoh masyarakat, BPD, nadhir, pimpinan lembaga pendidikan dan keagamaan, serta stake holder terkait untuk ikut serta dalam diskusi tentang rencana strategis kebijakan keagamaan yang dikonsep oleh Pemerintah Desa. Model audiensi yang digunakan oleh Pemerintah Desa cukup efektif menjadi strategi komunikasi dalam perumusan kebijakan. Pemerintah Desa hanya memerlukan sekali audiensi agar rencana kebijakan strategis tersebut dapat diterima oleh warga dan pihak terkait. Tidak adanya penolakan atau pertentangan dalam proses audiensi juga dilatarbelakangi oleh faktor kekuatan pemerintah yang didominasi oleh mayoritas tokoh strategis dan menjadi panutan di masing-masing dukuh.

c. Penentuan Kebijakan

Penentuan kebijakan merupakan upaya untuk mengetahui bagaimana alternatif kebijakan keagamaan tersebut ditetapkan, kriteria seperti apa yang harus dipenuhi, siapa yang akan melaksanakan kebijakan, bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan dan apa isi dari kebijakan yang ditetapkan.

Kebijakan dakwah di desa Margoyoso yang dibuat oleh Pemerintah Desa mengandung nilai-nilai ajaran Islam yang bersifat mendorong, mengajak dan memotivasi masyarakat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya dengan baik. Menurut Kepala Desa, lahirnya kebijakan tersebut tidak bertujuan untuk menjadikan Desa Margoyoso menjadi desa syariah atau tidak ada maksud yang mengarah pada pendirian Desa atau negara Islam dan menciptakan konstitusi yang berbasis syariah murni.

Pengaruh dibentuknya kebijakan dakwah di Desa Margoyoso dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti aspek sejarah, aspek politik lokal, dan aspek gerakan sosial keagamaan. Aspek sejarah berkaitan dengan bagaimana karakter desa Margoyoso yang sejah dahulu terkenal dengan tingkat religiusitasnya. Desa Margoyoso dikenal sebagai

Desa yang memiliki nuansa keagamaan kuat, selain itu, di Margoyoso juga terdapat banyak tokoh agama yang memiliki pengaruh kuat.

Aspek politik berkaitan dengan perebutan kekuasaan di tingkat desa. Bagi seorang politisi atau *incumbent* yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa, adanya kebijakan keagamaan sebagai bagian dari visi misi dapat dijadikan sebagai alat untuk meraih simpati publik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kepala Desa saat ini yang berjanji akan menjadikan Margoyoso sebagai desa yang agamis dalam kampanye pemilihan petinggi dahulu. Adapun aspek sosial keagamaan berkaitan dengan adanya kelompok keagamaan yang memiliki pengaruh kuat di Margoyoso, yaitu Nahdlatul Ulama.

2. Pesan Komunikasi Dakwah

Seiring dengan perkembangan zaman, dimana masyarakat berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut dan pemerintah berupaya untuk merumuskan berbagai macam agenda pemerintahan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, dakwah banyak digunakan sebagai opsi solusi dari problematika masyarakat. Terlebih saat ini setiap daerah dan desa memiliki wewenang tersendiri untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing.

Desa Margoyoso dalam dinamika perjalanannya memiliki problematika kemasyarakatan, terutama yang berkaitan dengan degradasi moral, kenakalan remaja, dan berbagai macam bentuk lainnya sebagai akibat dari dampak negatif globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Hal tersebut yang menjadikan salah satu motif dari Pemerintah Desa Margoyoso dalam membuat beberapa kebijakan keagamaan.

Menurut data Pemerintah Kabupaten Jepara, 190.149 remaja yang berusia antara 10-19 tahun di Kabupaten Jepara rentan terhadap berbagai macam problematika sosial seperti degradasi moral, kenakalan remaja, dan lain sebagainya yang salah satu penyebabnya adalah dampak dari globalisasi dan perkembangan teknologi. Problematika sosial tersebut juga dominan terjadi di wilayah lingkungan Desa Margoyoso.

Di Margoyoso, cerminan dari problematika tersebut misalnya bagaimana anak-anak usia sekolah yang dahulu rutin mengaji al quran setelah maghrib mulai berkurang kuantitasnya, seiring dengan kehadiran televisi, gadget, dan lain sebagainya. Selain itu, pada waktu sore hari yang dahulu digunakan oleh anak-anak untuk belajar di lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, Taman Pendidikan Al Quran, dan Madrasah Diniyyah mulai berkurang dikarenakan berbagai macam faktor seperti tidak ada

pengawasan dan dorongan dari lingkungan keluarga, pengaruh negatif lingkungan sekitar, dan lain sebagainya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum menyebabkan lahirnya perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Margoyoso, baik dari segi sosial, agama, politik, tradisi masyarakat, dan lain sebagainya. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai segi tatanan kehidupan warga Margoyoso, seperti cara berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Meskipun kemajuan tersebut mampu membawa perubahan yang besar dan luar biasa, namun kemajuan tersebut dipandang oleh Pemerintah Desa Margoyoso belum mampu menjawab berbagai macam permasalahan kehidupan manusia. Secara umum, masalah sosial yang muncul sebagai akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada.

Kondisi sosial di lingkungan keluarga desa Margoyoso sedikit banyak berubah semenjak banyaknya pabrik industri yang mulai bermunculan di wilayah Kabupaten Jepara bagian selatan yang mempekerjakan mayoritas kaum perempuan. Dengan kondisi tersebut, kaum perempuan banyak yang bekerja karena faktor tumpuan kepala keluarga, membantu perekonomian keluarga dan berbagai macam faktor lainnya yang dampaknya menyebabkan pengawasan terhadap anak menjadi berkurang karena mayoritas kaum laki-laki juga ikut bekerja.

Permasalahan sosial seperti adanya degradasi moral, kenakalan remaja, kriminalitas, dan gejolak politik yang ada suatu wilayah mempengaruhi atau memaksa aktor kebijakan untuk meresponnya dengan memasukannya ke dalam agenda pemerintah yang selanjutnya melahirkan kebijakan publik untuk memecahkan masalah-masalah yang bersangkutan. Menurut teori sistem, pembuatan atau lahirnya kebijakan publik tidak dapat terlepas dari pengaruh lingkungan. Tuntutan adanya kebijakan publik biasanya lahir karena adanya pengaruh lingkungan, dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu sistem politik.

Isi kebijakan dakwah Pemerintah Desa Margoyoso mengandung materi atau pesan dakwah. Materi dakwah merupakan pesan-pesan yang berupa ajaran Islam atau segala sesuatu yang bersumber dari al Quran dan Hadits yang harus disampaikan oleh pelaku dakwah kepada objek dakwah. Secara umum, materi dakwah diklasifikasikan menjadi empat masalah pokok, yaitu masalah akidah, masalah syariat, masalah muamalah, dan masalah akhlak.

Pemerintah Desa Margoyoso bersama Badan Perwakilan Desa (BPD), dan berdasarkan saran dan masukan dari berbagai tokoh agama dan masyarakat setempat

menetapkan beberapa kebijakan dakwah yang meliputi gerakan shalat subuh berjamaah, gerakan mematikan televisi setelah maghrib, gerakan ayo mengaji, dan gerakan wajib madrasah diniyah. Kebijakan tersebut sampai saat ini belum memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, artinya produk kebijakan tersebut selama ini berjalan dengan model dakwah atau anjuran dalam rangka meningkatkan keimanan dan religiusitas masyarakat desa yang disertai dengan kontrol dan keteladanan dari pemerintah desa. Kebijakan dakwah di desa Margoyoso yang dibuat oleh Pemerintah Desa hanya bersifat mengajak dan memotivasi masyarakat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya dengan baik. lahirnya kebijakan tersebut tidak bertujuan untuk menjadikan Desa Margoyoso menjadi desa syariah atau tidak ada maksud yang mengarah pada pendirian negara Islam dan menciptakan konstitusi berbasis syariah

Kebijakan shalat subuh berjamaah dilakukan pemerintah desa Margoyoso pada setiap hari sabtu dengan teknis idaroh atau bergantian di setiap masjid atau mushola. Di Margoyoso terdapat 20 masjid atau mushola yang tersebar secara merata. Kebijakan shalat subuh berjamaah dikoordinir oleh perangkat desa bagian pelayanan atau moden, yaitu Maftukhin Lutfi dan Samsudin. Sebelum pelaksanaan kebijakan, tepatnya pada tahap perumusan kebijakan, Pemerintah Desa mengumpulkan para takmir masjid dan mushola untuk berdiskusi dan merespon beberapa wacana kebijakan dakwah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Teknis pelaksanaannya adalah dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para takmir masjid dan mushola di Balai Desa. Upaya sosialisasi juga dilakukan dengan membuat pamflet dan brosur yang dipasang di tempat-tempat strategis seperti perempatan jalan, pos ronda, tempat keramaian, dan masjid atau mushola. Mayoritas perangkat desa yang sekaligus menjadi tokoh organisasi sosial keagamaan juga menjadi kelebihan tersendiri dalam proses sosialisasi kebijakan ini. Kegiatan safari subuh dilakukan oleh Pemerintah Desa Margoyoso di 21 tempat ibadah yang terdiri dari masjid dan mushola yang ada di lingkungan masyarakat Margoyoso secara rutin pada sabtu subuh. Kegiatan tersebut menarik, karena kepala desa mengintruksikan kepada seluruh perangkat desa agar memberikan keteladanan dengan wajib hadir di acara tersebut.

Sebelum kegiatan dilaksanakan, koordinator atau penanggung jawab memberikan surat pemberitahuan kepada nadhir atau takmir yang mendapatkan giliran tempat setiap hari senin dengan disertai pemberian uang sumbangan lima ratus ribu rupiah untuk biaya konsumsi. Uang tersebut diambilkan dari anggaran dana desa (ADD) dan CSR dari Bank BRI dan BNI. Untuk semakin menguatkan sosialisasi pelaksanaan program, setiap hari

jumat juga digunakan untuk sosialisasi kepada warga masyarakat tentang tempat pelaksanaan safari subuh saat itu. Koordinator memanfaatkan momentum salat jumat sebagai media untuk sosialisasi dengan memberikan pengumuman sebelum pelaksanaan khutbah dimulai

Kebijakan mematikan televisi setelah maghrib merupakan salah satu kebijakan dakwah Pemerintah Desa Margoyoso yang bertujuan untuk membentuk karakter, kepribadian, dan membentengi remaja dari pengaruh televisi yang menyebabkan terjadinya degradasi moral. Implementasi kebijakan mematikan televisi setelah maghrib dikoordinir oleh Kasi Pelayanan atau moden desa, yaitu Maftukhin Lutfi dan Samsudin. Koordinator tersebut menjalin kerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, RT, dan koordinator wilayah untuk ikut serta dalam suksesi pelaksanaan melalui pemberian pengertian dan pengarahan, serta pengawasan. Sejauh ini, belum ada sanksi yang jelas yang diberikan kepada warga masyarakat Margoyoso yang tidak menjalankan intruksi tersebut. Pihak Pemerintah Desa hanya bersifat mengajak, mendorong dan memberikan sanksi sosial berupa teguran melalui koordinator wilayah.

Kebijakan mengaji al quran setelah maghrib merupakan kebijakan dakwah yang sepaket dengan kebijakan mematikan televisi setelah maghrib. Setelah masyarakat mematikan televisi setelah maghrib, Pihak Pemerintah Desa berharap agar masyarakat menjalankan aktifitas keagamaan berupa mengaji alquran. Koordinator dari pelaksanaan kebijakan ini adalah Maftukhin Lutfi dan Samsudin selaku Kasi Pelayanan dan moden Margoyoso. Koordinator kebijakan selanjutnya berkoordinasi dengan para tokoh agama, guru, ustaz, lingkungan keluarga, dan koordinator wilayah untuk mendorong para remaja agar ikut serta menjalankan kegiatan ini.

Menurut Maftukhin, Sasaran kebijakan ini sebenarnya ditujukan tidak hanya kepada para remaja saja, tetapi juga kepada lingkungan keluarga, karena lingkungan tersebut sangat berpengaruh terhadap kesediaan anaknya dalam mengaji. Jika orang tua atau lingkungan keluarga ikut mengajak dan mendorong dengan memberikan keteladanan, maka anaknya juga akan lebih mudah untuk ikut serta dalam mengaji tersebut. Untuk memberikan apresiasi kepada ustaz dan tokoh agama yang berkenan mengajar anak mengaji, Pemerintah Desa Margoyoso selama ini memberikan bantuan insentif yang dicairkan setahun sekali ketika bulan ramadhan.

Di Margoyoso, pendirian madrasah diniyah memiliki latar belakang yang unik dimana kebanyakan didirikan oleh perorangan yang semata-mata bertujuan untuk ibadah. Sistem yang digunakan adalah tergantung kepada latar belakang pendiri dan pengasuhnya

sehingga pertumbuhan madrasah diniyah memiliki banyak ragam dan coraknya. Pendidikan madrasah diniyah memiliki dua sistem pembelajaran, yaitu sistem sekolah dan non sekolah. Pada sistem sekolah, madrasah diniyah menggunakan konsep kelas dalam pelaksanaannya, yaitu kelas 1 sampai dengan kelas VI disebut diniyah ula, kelas VII sampai IX disebut diniyah wustho, dan kelas X sampai XII disebut diniyah ulya. Pendidikan diniyah secara khusus hanya mempelajari ilmu agama dan bahasa Arab. Potensi yang ada di madrasah diniyah tidak jauh berbeda dengan potensi pondok pesantren, karena keduanya terbentuk, lahir, tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat dan dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat.

Kekuatan utama madrasah diniyah adalah kemampuannya menghadapi berbagai masalah yang muncul. Meskipun dengan kondisi yang serba kekurangan, Madrasah diniyah justru semakin berkembang. Pola, pendekatan, dan sistem pembelajarannya juga tidak terikat dengan modelmodel tertentu. Kebijakan yang diterapkan di Margoyoso adalah minimal sampai batas diniyah ula atau kelas I sampai VI, sehingga yang menjadi sasaran program kebijakan dakwah Pemerintah Desa pada umumnya adalah anak-anak dan remaja. Menurut Maftuhin, kegiatan madrasah diniyah di Margoyoso selama ini diikuti oleh anak-anak yang tidak hanya dari latar belakang Nahdlatul Ulama, tetapi juga dari Muhammadiyah. Namun, mengacu pada data desa, dimana anak-anak usia 5-14 tahun yang menjadi sasaran kebijakan wajib madrasah diniyah jumlahnya mencapai 1310 anak. Angka tersebut tentu sangat besar sehingga memerlukan perhatian, penanganan, dan pembinaan yang serius. Melihat data madrasah diniyah yang saat ini ada di Margoyoso berjumlah 3 lembaga perlu menjadi pertimbangan Pemerintah dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Jangan sampai adanya kebijakan wajib madrasah diniyah justru menjadi permasalahan baru jika tidak mendapatkan pembinaan dan perhatian yang serius dari Pemerintah Desa.

3. Proses Komunikasi dan Sosialisasi

Proses komunikasi artinya bagaimana Pemerintah Desa mengkomunikasikan kebijakan keagamaan kepada warga masyarakat Margoyoso. Proses komunikasi dari program kebijakan dakwah tentu penting untuk diperhatikan agar warga masyarakat sebagai sasaran dakwah dapat menerima, memahami, dan ikut serta dalam program kebijakan yang telah ditetapkan (Sumadi Dilla, 2007). Keberhasilan dari proses komunikasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi atau komunikator, cara yang ditempuh, kepentingan atau tujuan komunikasi, ruang lingkup,

saluran atau media yang digunakan, dan isi pesan yang disampaikan (Burhan Bungin, 2006).

Komunikasi dalam sosialisasi kebijakan dakwah di pemerintahan desa Margoyoso selama ini dilakukan dengan berbagai macam pendekatan seperti struktural, kultural, majlis taklim, media sosial, dan lain sebagainya. Pendekatan struktural merupakan proses komunikasi program keagamaan dilaksanakan oleh pemerintah desa secara legal formal dengan mengundang para tokoh agama, tokoh masyarakat, nadhir masjid dan mushola, serta *stake holder* terkait di Balai Desa Margoyoso. Pendekatan ini juga sebagai tindak lanjut dari kegiatan audiensi perumusan kebijakan yang telah dilaksanakan. Melalui pendekatan struktural, Pemerintah Desa memiliki harapan agar para tokoh dan stake holder terkait tersebut mampu mengkomunikasikan dan menginformasikan program kebijakan desa kepada warga sehingga dapat diterima dengan baik.



Sosialisasi Dakwah Pemerintah Desa

Pendekatan kultural selama ini dilakukan oleh para stakeholder terkait melalui informasi secara langsung kepada sasaran program seperti melalui forum pengajian umum, pengajian ibu-ibu, majlis ta'lim, kegiatan diniyah, dan lain sebagainya. Pendekatan kultural yang dilakukan oleh Pemerintah Desa memiliki sasaran utama golongan ibu-ibu atau perempuan. Hal tersebut dimaksudkan agar program tersebut mampu diinformasikan kembali di lingkup lingkungan keluarga. Sosialisasi juga dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui sosial media, Facebook.

Pemerintah Desa juga membuat berbagai macam pamflet yang ditempel di berbagai masjid, mushola, dan jalan raya.

D. Kesimpulan

Komunikasi dakwah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Margoyoso dalam membangun desa yang religius tidak dapat terlepas dari adanya kebijakan otonomi desa, dimana Pemerintah Desa dapat mengatur dan mengelola wilayah pemerintahannya sendiri sesuai dengan corak dan khasnya masing-masing. Lahirnya kebijakan dakwah di Pemerintahan Desa Margoyoso dilatarbelakangi oleh dua hal, yaitu permasalahan sosial berupa degradasi moral remaja dan politik keagamaan dari Pemerintah Desa.

Penerapan kebijakan dakwah tersebut sarat dengan kepentingan politik dari Pemerintah Desa yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Selain itu, Faktor terpilihnya kepala desa saat ini disebabkan adanya dukungan dari mayoritas pengusaha, tokoh agama dan masyarakat yang memiliki kekuatan finansial dan pengaruh masa serta adanya konsep kampanye yang ingin menjadikan Margoyoso sebagai Desa yang religius.

Dibentuknya kebijakan dakwah di Desa Margoyoso juga dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti aspek politik lokal dan aspek gerakan sosial keagamaan. Aspek politik berkaitan dengan perebutan kekuasaan di tingkat desa sebagai bagian dari visi misi yang dapat dijadikan sebagai alat untuk meraih simpati publik. Adapun aspek sosial keagamaan berkaitan dengan adanya kelompok keagamaan yang memiliki pengaruh kuat di Margoyoso, yaitu Nahdlatul Ulama.

Komunikasi dakwah melalui kebijakan publik dilakukan melalui beberapa tahap seperti formulasi masalah, perumusan kebijakan, perencanaan program pelaksanaan dan proses legitimasi dan komunikasi. Pemerintah Desa Margoyoso bersama Badan Perwakilan Desa, dan berdasarkan masukan dari berbagai tokoh agama dan masyarakat setempat menetapkan beberapa kebijakan dakwah yang meliputi gerakan shalat subuh berjamaah, gerakan mematikan televisi setelah maghrib, gerakan ayo mengaji, dan gerakan wajib madrasah diniyah.

Komunikasi dalam sosialisasi kebijakan dakwah di pemerintahan desa Margoyoso selama ini dilakukan dengan berbagai macam pendekatan seperti struktural, kultural, majlis taklim, media sosial, dan lain sebagainya. Pendekatan struktural dilaksanakan oleh pemerintah desa secara legal formal dengan mengundang para tokoh agama, tokoh masyarakat, nadhir masjid dan mushola, serta *stake holder* terkait di Balai Desa Margoyoso. Pendekatan kultural selama ini dilakukan oleh para stakeholder terkait melalui informasi secara langsung kepada

sasaran program seperti melalui forum pengajian umum, pengajian ibu-ibu, majlis ta'lim, kegiatan diniyah, dan lain sebagainya. Sosialisasi juga dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui sosial media, Facebook. Pemerintah Desa juga membuat berbagai macam pamflet yang ditempel di berbagai masjid, mushola, dan jalan raya.

REFERENSI

- Abidin, Said. (2012). *Zainal Kebijakan Publik*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Al Faruqi, Ismail R. (2000). *Menjelajah Atlas Dunia Islam*. Bandung: Mizan.
- Amin, Samsul Munir. (2009). *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Amzah.
- Anderson, James. (1969). *Public Policy Making*, Newyork: Holt.
- Anshari, Hafi. (1993). *Pemahaman dan Pengalaman Dakwah*, Surabaya: Al Ikhlas.
- Basit, Abdul. (2013). *Filsafat Dakwah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Abdul Aziz. (2002). *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam I*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Dye, Thomas. R. (2013). *Understanding Public Policy*, America: Pearson.
- Edwards, George C. dan Sharkansky. (1978). *The Policy Predicament: Making and Implementing Public Policy*, San Fransisco: WH Freeman and Company.
- Hogwood, Brian W. dan Lewis E. Gunn. (1984). *Policy Analysis For The Real World*, USA: Oxford University Press.
- Jones, Charles O. (1977). *An Introduction To The Study of Public Policy*, North Scituate, Duxbury Press.
- Kayo. (2007). *Khatib Pahlawan Manajemen Dakwah*, Jakarta: Amzah.
- Maryolo, Amril. (2018). "Formalisasi Syariat Islam di Bulukumba", *Tesis Program Studi Islamic Interdisciplinary Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Muqsi. 2007. *Hubungan Dakwah dan Komunikasi*, Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam, Vol. 1 No. 1. 27-36.
- Noer, Muhammad. (2007). *Dakwah untuk Umat : Makalah dalam Workshop Program Studi Sejenis Ditjen Pendidikan Islam Depag R.*, ttp: tp.
- Nugroho, Riant. (2017). *Public Policy*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Purwanto, Erwan Agus dkk. (2015). *Mengembangkan Profesi Analisis Kebijakan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ratih, Devi Nur, Oktavianti Meria. (2019). *Komunikasi Dakwah Pemuda Hijrah*, *Jurnal Manajemen Komunikasi*, Volume 3(2), 56-70.
- Santoso, Purwo. (2010). *Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: PolGov.

- Schneider, Anne. (2013). *Policy Design and Transfer*, Eduardo Araral, dkk (ed), *Routledge Handbook of Public Policy*, Newyork: Routledge.
- Subarsono. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukayat, Tata. (2015). *Ilmu Dakwah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Suriani, Julis. (2017). *Komunikasi Dakwah di Era Cyber*, *Jurnal An Nida': Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 41(2). 56-72.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta: Medpress,